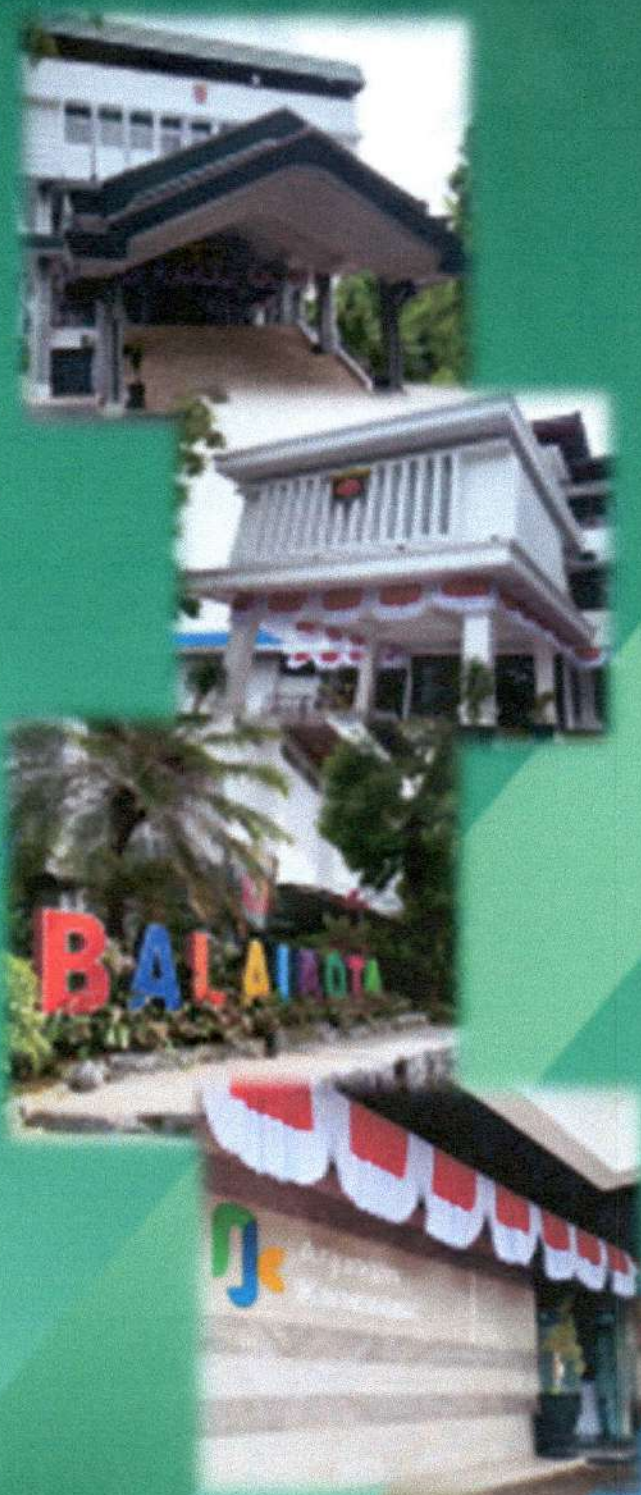




# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **2021-2026**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82  
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR**



PEMERINTAH

KALIMANTAN

SARANGGANI

(KABUPATEN)

2021-2026

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 83  
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Perubahan Rancangan Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan.

Perubahan Rancangan Strategis (P-RENSTRA) memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun berjalan, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* khususnya di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Akhir kata, semoga dengan adanya Dokumen Perubahan Rancangan Strategis (P-RENSTRA) 2021 – 2026 ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Samarinda, 3 Juli 2023  
Sekretaris Daerah,



**H. HERO MARDANUS SATYAWAN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4. Sistematika Penulisan ..... 5

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 9

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ... 40

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
Perangkat Daerah ..... 48

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Terpilih ..... 53

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ..... 53

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis pada RPJMD ..... 53

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis ..... 54

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 58

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan ..... 60

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ..... 63

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ..... 77

**BAB VIII PENUTUP**

8.1 Penutup ..... 79

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan..... 49

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 62

**BAB VIII PENUTUP**

8.1 Penutup..... 64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-RENSTRA SKPD) merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Perubahan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan dan Capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam penyusunan Perubahan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Perubahan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Perubahan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencanan Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keluarnya Permendagri tersebut akan memperkuat tugas, fungsi dan peran Kepala SKPD untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan SKPD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah )

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud ditetapkan Perubahan Rencana Strategis agar Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya sampai sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai upaya ke depan untuk :

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahu ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu;

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan Perubahan Rencana Strategis adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahun 2021 – 2026 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017. Sistematika Penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Daerah Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda. Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan unsur staf (pembantu pimpinan pemerintah daerah) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda.

##### 2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 103 Tahun 2021 tugas Pokok Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

##### 2.1.2. Fungsi

Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda No. 103 Tahun 2021 untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan program kerja Sekretariat Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan strategis kebijakan pembangunan pada urusan Pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah;
- f. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- g. penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

### 2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Samarinda dipimpin Sekretaris Daerah dan dibantu oleh :

- A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten I, membawahkan :
  - 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3. Bagian Kerjasama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten II, membawahkan :
  - 1. Bagian Perekonomian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- C. Asisten Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten III, membawahkan :
  - 1. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
    - a) Subbagian Protokol; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- D. Staf Ahli; dan
- E. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Samarinda ditunjang dengan Sumber Daya aparatur sebanyak 386 orang. Yang terdiri dari PNS sebanyak 242 orang dan PTTB sebanyak 145 orang.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

| No | Status | Jumlah | Golongan |    |     |    | Jenis Kelamin |     | Ket |
|----|--------|--------|----------|----|-----|----|---------------|-----|-----|
|    |        |        | I        | II | III | IV | L             | P   |     |
| 1  | PNS    | 246    | 3        | 84 | 142 | 17 | 146           | 100 |     |
| 2  | PTTB   | 135    | -        | -  | -   | -  | 85            | 50  |     |

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

2.3.1. Pelayanan Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

1. Bagian Tata Pemerintahan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di Bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang meliputi tata pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi daerah, administrasi pejabat Negara, bina administrasi kecamatan dan kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaanm, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaandan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama
3. Bagian Kerjasama mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang kerjasama, penataan wilayah dan adminisrtrasi perkantoran.
4. Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukumdand telaahan hokum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

**2.3.2. Pelayanan dibidang Perekonomian dan Pembangunan, meliputi :**

1. Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta BUMD.
2. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, penyusunan program, pengendalian pembangunan, evaluasi dan administrasi pelaksanaan pembangunan.
3. Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan fungsi membantu Asisten Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pengadaan barang dan jasa.

**2.3.3. Pelayanan dibidang Administrasi dan Umum, meliputi :**

1. Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan dan Keuangan

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                           | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Sekretariat Daerah |           |           |           |           | Realisasi Capaian Tahun ke- |                |               |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |        |          |       |       | Bagian                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|--------|----------|-------|-------|------------------------|
|     |                                                                                      |             |            |                          | 2021                              | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2021                        | 2022           | 2023          | 2024  | 2025  | 2021                         | 2022   | 2023     | 2024  | 2025  |                        |
| 1   | 2                                                                                    | 3           | 4          | 5                        | 6                                 | 7         | 8         | 9         | 10        | 11                          | 12             | 13            | 14    | 15    | 16                           | 17     | 18       | 19    | 20    | 21                     |
| 1   | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                          |             |            |                          | 0 Dokumen                         | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0                           | Rp. 19.859.000 | Rp 23.000.000 | Belum | Belum | 0                            | 99.23% | 38.33%   | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |
| 2   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil |             |            |                          | 7 Dokumen                         | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4 Laporan | 4 Laporan | Rp 117.744.200              | Rp 26.304.000  | Rp 31.200.000 | Belum | Belum | 90.24%                       | 98.37% | 52.000 % | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |
| 3   | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan                                          |             |            |                          | 0 Dokumen                         | 7 Dokumen | 7 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 0                           | 0              | 0             | Belum | Belum | 0                            | 0      | 0        | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |
| 4   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |             |            |                          | 0 Laporan                         | 0 Laporan |           |           |           | 0                           | 0              | Rp 27.795.000 | Belum | Belum | 0                            | 0      | 92.65%   | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |
|     |                                                                                      |             |            |                          |                                   |           |           |           |           |                             |                |               |       |       |                              |        |          |       |       |                        |

|   |                                                                                                                    |  |  |  |           |           |           |           |           |                   |                   |                   |       |       |        |        |        |       |       |                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------------------------|
| 4 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |  |  |  | 12 Bulan  | 184 Orang | 194 Orang | 194 Orang | 194 Orang | Rp 25.648.041.080 | Rp 25.228.583.026 | Rp 10.653.548.098 | Belum | Belum | 97.59% | 94.52% | 38.41% | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |
| 5 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |  |  |  | 173 Orang | 168 Orang | 270 Orang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Rp 5.662.437.909  | Rp 5.728.558.526  | Rp 2.313.632.112  | Belum | Belum | 96.47% | 96.16% | 18.26% | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |
| 6 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  |  | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5 Dokumen | 6 Laporan | 6 Laporan | 0                 | Rp 118.325.280    | Rp 45.662.000     | Belum | Belum | 0      | 99.55% | 18.26% | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |
|   |                                                                                                                    |  |  |  |           |           |           |           |           |                   |                   |                   |       |       |        |        |        |       |       |                        |
| 7 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   |  |  |  | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 0                 | Rp 397.300.300    | 0                 | Belum | Belum | 0      | 99.33% | 0      | Belum | Belum | Umum                   |
|   |                                                                                                                    |  |  |  |           |           |           |           |           |                   |                   |                   |       |       |        |        |        |       |       |                        |
| 8 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya                                                         |  |  |  | 342 Stel  | 292 Stel  | 4 Paket   | 4 Paket   | 4 Paket   | Rp 467.500.000    | Rp 84.768.000     | 0                 | Belum | Belum | 79.60% | 42.38% | 0      | Belum | Belum | Umum                   |

|    |                                                                                        |  |  |  |         |          |          |          |          |                   |                   |                  |       |       |        |        |        |       |       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 9  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |  |  |  | 0 Orang | 10 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 0                 | 0                 | 0                | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 10 | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |  |  |  | 0 Orang | 0 Orang  | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 0                 | 0                 | 0                | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 11 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  | 0 Orang | 0 Orang  | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 0                 | 0                 | 0                | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
|    |                                                                                        |  |  |  |         |          |          |          |          |                   |                   |                  |       |       |        |        |        |       |       |      |
| 12 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan     |  |  |  | 2 Jenis | 70 Jenis | 1 Paket  | 1 Paket  | 1 Paket  | Rp 686.278.175    | Rp 671.190.964    | Rp 18.676.070    | Belum | Belum | 99.80% | 44.08% | 1.85%  | Belum | Belum | Umum |
| 13 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Daerah                  |  |  |  | 2 Jenis | 63 Paket | 2 Paket  | 2 Paket  | 2 Paket  | Rp 13.552.177.033 | Rp 11.287.101.224 | Rp 3.507.555.500 | Belum | Belum | 79.47% | 89.23% | 39.02% | Belum | Belum | Umum |

|    |                                                                              |  |  |  |                                   |                                       |           |           |           |                  |                     |                  |       |       |        |        |        |       |       |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 14 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          |  |  |  | 0 Paket                           | 0 Paket                               | 0 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 0                | 0                   | 0                | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 15 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                           |  |  |  | 6 Jenis                           | 10 Jenis                              | 0 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | Rp 1.613.227.450 | Rp 378.502.500      | Rp 574.922.700   | Belum | Belum | 94.07% | 99.85% | 22.17% | Belum | Belum | Umum |
| 16 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                    |  |  |  | 4 Jenis                           | 15 Dokumen                            | 0 Paket   | 2 Paket   | 2 Paket   | Rp 365.256.950   | Rp 655.782.000      | Rp 115.657.995   | Belum | Belum | 91.59% | 75.57% | 12.16% | Belum | Belum | Umum |
| 17 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan |  |  |  | 0 Dokumen                         | 0 Dokumen                             | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0                | 0                   | 0                | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 18 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     |  |  |  | 79 Rombongan tamu yang berkunjung | 12.500 Rombongan tamu yang berkunjung | 0 Laporan | 4 laporan | 4 laporan | Rp 806.798.950   | Rp 2.000.451.335    | Rp 1.020.232.500 | Belum | Belum | 78.88% | 93.00% | 38.18% | Belum | Belum | Umum |
| 19 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |  |  |  | 100 Sppd                          | 548 Sppd                              | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | Rp 2.824.900.000 | Rp 2.237.711.326,28 | Rp 1.053.047.522 | Belum | Belum | 77.68% | 99.33% | 22.99% | Belum | Belum | Umum |
| 20 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         |  |  |  | 0 Dokumen                         | 0 Dokumen                             | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0                | 0                   | 0                | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
|    |                                                                              |  |  |  |                                   |                                       |           |           |           |                  |                     |                  |       |       |        |        |        |       |       |      |

|    |                                                                                 |  |  |  |           |           |           |           |           |   |                      |                    |       |       |   |        |        |       |       |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------------------|--------------------|-------|-------|---|--------|--------|-------|-------|------|
| 21 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan  |  |  |  | 5 Unit    | 5 Unit    | 5 Unit    | 5 Unit    | 5 Unit    | 0 | Rp 357.25<br>3.331   | Rp 555.97<br>0.932 | Belum | Belum | 0 | 34.80% | 39.10% | Belum | Belum | Umum |
| 22 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                |  |  |  | 2 unit    | 2 unit    | 2 unit    | 2 unit    | 2 unit    | 0 | Rp 610.90<br>2.500   | 0                  | Belum | Belum | 0 | 82.46% | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 23 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                              |  |  |  | 10 unit   | 10 unit   | 12 unit   | 12 unit   | 18 unit   | 0 | Rp 1.805.5<br>74.012 | 0                  | Belum | Belum | 0 | 52.41% | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 24 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                              |  |  |  | 0 unit    | 0 unit    | 3 unit    | 3 unit    | 3 unit    | 0 | 0                    | 0                  | Belum | Belum | 0 | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 25 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                  |  |  |  | 0 unit    | 0 unit    | 1 unit    | 1 unit    | 1 unit    | 0 | 0                    | 0                  | Belum | Belum | 0 | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 26 | Jumlah Aset tak berwujud yang disediakan                                        |  |  |  | 0 unit    | 0 unit    | 1 unit    | 1 unit    | 1 unit    | 0 | 0                    | 0                  | Belum | Belum | 0 | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 27 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan |  |  |  | 0 unit    | 0 unit    | 5 unit    | 5 unit    | 5 unit    | 0 | 0                    | 0                  | Belum | Belum | 0 | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
|    |                                                                                 |  |  |  |           |           |           |           |           |   |                      |                    |       |       |   |        |        |       |       |      |
| 28 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |  | 0 Laporan | 0 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0                    | 0                  | Belum | Belum | 0 | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |

|    |                                                                                                        |  |  |  |                      |                      |           |           |           |                  |                  |                  |       |       |        |        |        |       |       |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 29 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 |  |  |  | 888 Bukti Pembayaran | 548 Bukti Pembayaran | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | Rp 2.256.329.651 | Rp 2.864.536.774 | Rp 1.248.788.483 | Belum | Belum | 82.93% | 90.75% | 31.31% | Belum | Belum | Umum |
| 30 | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                               |  |  |  | 0 Laporan            | 0 Laporan            | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 0                | 0                | 0                | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum |
| 31 | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                           |  |  |  | 100 Bukti Pembayaran | 10 Bukti Pembayaran  | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | Rp 300.1663.500  | Rp 5.644.856.000 | Rp 2.069.084.000 | Belum | Belum | 99.99% | 96.42% | 31.62% | Belum | Belum | Umum |
|    |                                                                                                        |  |  |  |                      |                      |           |           |           |                  |                  |                  |       |       |        |        |        |       |       |      |
| 32 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |  |  |  | 0 Unit               | 85 Unit              | 85 Unit   | 85 Unit   | 85 Unit   | 0                | Rp 1.245.661.547 | Rp 336.163.313   | Belum | Belum | 0      | 93.61% | 19.68% | Belum | Belum | Umum |
| 33 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya     |  |  |  | 92Unit               | 16 Unit              | 16 Unit   | 16 Unit   | 16 Unit   | Rp 1.372.704.369 | Rp 430.639.291   | Rp 155.444.906   | Belum | Belum | 87.39% | 91.61% | 17.11% | Belum | Belum | Umum |

|    |                                                                                              |  |  |  |               |               |               |               |               |                   |                  |                |       |       |        |        |        |       |       |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------------------------|
| 34 | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara                                                   |  |  |  | 0 Unit        | 0 Unit        | 10 Unit       | 10 Unit       | 10 Unit       | 0                 | 0                | Rp 107.589.006 | Belum | Belum | 0      | 0      | 8.54%  | Belum | Belum | Umum                   |
| 35 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                    |  |  |  | 0 Unit        | 0 Unit        | 1 Unit        | 1 Unit        | 1 Unit        | 0                 | 0                | 0              | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum                   |
| 36 | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                     |  |  |  | 0 Unit        | 0 Unit        | 1 Unit        | 1 Unit        | 1 Unit        | 0                 | 0                | 0              | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Umum                   |
| 37 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                     |  |  |  | 4 Gedung      | 4 Gedung      | 3 Unit        | 1 Unit        | 1 Unit        | Rp 10.441.477.712 | Rp 6.919.285.963 | Rp 419.749.710 | Belum | Belum | 99.40% | 55.85% | 10.62% | Belum | Belum | Umum                   |
| 38 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi |  |  |  | 84 Jenis      | 1.200 Jenis   | 3 Unit        | 1 Unit        | 1 Unit        | Rp 906.572.895    | Rp 1.632.623.117 | 0              | Belum | Belum | 84.42% | 77.63% |        | Belum | Belum | Umum                   |
|    |                                                                                              |  |  |  |               |               |               |               |               |                   |                  |                |       |       |        |        |        |       |       |                        |
| 39 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          |  |  |  | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | Rp 967.133.300    | Rp 166.431.305   | Rp 95.911.662  | Belum | Belum | 66.31% | 22.41% | 12.92% | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |

|    |                                                                                                          |  |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                |       |       |        |        |        |       |       |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------------------------|
| 40 | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |  |  |  | 0 Paket         | 0 Paket         | 6 Paket         | 6 Paket         | 6 Paket         | 0                | 0                | Rp 9.640.000   | Belum | Belum | 0      | 0      | 2.24%  | Belum | Belum | Umum                   |
| 41 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       |  |  |  | 4 Orang         | 2 Orang         | 4 Orang         | 4 Orang         | 4 Orang         | Rp 26.362.786    | Rp 27.145.194    | Rp 3.728.500   | Belum | Belum | 12.20% | 12.57% | 3.73%  | Belum | Belum | Perencanaan & Keuangan |
| 42 | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              |  |  |  | 300 Orang/Bulan | 272 Orang/Bulan | 350 Orang/Bulan | 350 Orang/Bulan | 400 Orang/Bulan | Rp 1.021.816.630 | Rp 2.621.574.114 | Rp 300.000.000 | Belum | Belum | 85.17% | 95.75% | 33.29% | Belum | Belum | Umum                   |
|    |                                                                                                          |  |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                |       |       |        |        |        |       |       |                        |
| 43 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        |  |  |  | 1 Jenis         | 2 Jenis         | 2 Paket         | 2 Paket         | 2 Paket         | Rp 1.774.628.170 | Rp 1.811.788.960 | Rp 194.789.500 | Belum | Belum | 69.34  | 99.83% | 30.71% | Belum | Belum | Umum                   |
| 44 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  |  |  |  | 1 Jenis         | 2 Jenis         | 2 Paket         | 2 Paket         | 2 Paket         | Rp 673.159.481   | Rp 917.088.100   | Rp 118.424.600 | Belum | Belum | 69.15% | 93.38% | 27.87% | Belum | Belum | Umum                   |

|    |                                                                                                              |  |  |  |                     |                     |           |           |           |                |                  |               |       |       |        |        |        |       |       |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------------|
| 45 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                       |  |  |  | 1 Jenis             | 2 Jenis             | 0 Paket   | 0 Paket   | 0 Paket   | Rp 645.506.000 | Rp 1.487.835.500 | 0             | Belum | Belum | 99.99% | 99.76% | 0      | Belum | Belum | Umum       |
| 45 | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                  |  |  |  | 3 Laporan           | 1 Laporan           | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Rp 275.911.984 | Rp 85.249.500    | Rp 25.050.000 | Belum | Belum | 98.70% | 100%   | 8.34%  | Belum | Belum | Organisasi |
| 46 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                            |  |  |  | 100%                | 1 Laporan           | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | Rp 210.720.815 | Rp 19.009.500    | 0             | Belum | Belum | 87.60% | 99.56% | 0      | Belum | Belum | Organisasi |
| 47 | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                   |  |  |  | 47 Perangkat Daerah | 47 Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Rp 240.202.883 | Rp 78.825.00     | Rp 22.800.000 | Belum | Belum | 93.69% | 100%   | 8.82%  | Belum | Belum | Organisasi |
| 48 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |  |  |  | 0 Laporan           | 1 Laporan           | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0              | Rp 38.290.100    | Rp 15.000.000 | Belum | Belum | 0      | 78.31% | 11.10% | Belum | Belum | Organisasi |
| 49 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |  |  |  | 0 Laporan           | 1 Laporan           | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0              | Rp 65.092.000    | Rp 29.400.000 | Belum | Belum | 0      | 99.80% | 10.00% | Belum | Belum | Organisasi |

|    |                                                                  |  |  |  |             |              |            |            |            |                   |                   |                   |       |       |        |        |        |       |       |                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|
| 50 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan                      |  |  |  | 2 Laporan   | 1 Laporan    | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | Rp 927.76 9.000   | Rp 2.517.0 21.280 | Rp 1.152.5 85.600 | Belum | Belum | 98.32% | 99.32% | 43.17% | Belum | Belum | Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 51 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan               |  |  |  | 20 Laporan  | 1000 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | Rp 188.13 1.750   | Rp 710.32 9.000   | Rp 1.399.8 47.100 | Belum | Belum | 79.67% | 96.03% | 60.99% | Belum | Belum | Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 52 | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                   |  |  |  | 500 Laporan | 500 Laporan  | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | Rp 434.44 4.350   | Rp 118.26 0.050   | Rp 5.507.5 00     | Belum | Belum | 96.97% | 96.92% | 0.62%  | Belum | Belum | Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
|    |                                                                  |  |  |  |             |              |            |            |            |                   |                   |                   |       |       |        |        |        |       |       |                                  |
| 53 | Jumlah Dokumen hasil Penataan administrasi Pemerintah            |  |  |  | 203%        | 4 Laporan    | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Rp 312.74 6.739   | Rp 169.92 1.000   | Rp 62.922. 000    | Belum | Belum | 85.91% | 96.86% | 15.61% | Belum | Belum | Pemerintahan                     |
| 54 | Jumlah Dokumen hasil Penataan administrasi Kewilayahan           |  |  |  | 13 Laporan  | 1 Laporan    | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Rp 362.82 1.763   | Rp 813.15 9.190   | Rp 569.60 1.103   | Belum | Belum | 80.74% | 84.11% | 35.60% | Belum | Belum | Pemerintahan                     |
| 55 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah        |  |  |  | 0 Persen    | 1 Laporan    | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 0                 | Rp 30.344. 050    | Rp 14.027. 000    | Belum | Belum | 0      | 88.98% | 13.62% | Belum | Belum | Pemerintahan                     |
|    |                                                                  |  |  |  |             |              |            |            |            |                   |                   |                   |       |       |        |        |        |       |       |                                  |
| 56 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual |  |  |  | 52 Laporan  | 12 Laporan   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Rp 4.963.9 19.800 | Rp 11.35.9 00.893 | Rp 2.915.8 25.000 | Belum | Belum | 99.28% | 87.15% | 24.32% | Belum | Belum | Kesra                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |              |              |              |              |              |                       |                       |                      |       |       |        |        |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 57 | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB |  |  |  | 2<br>Laporan | 2<br>Laporan | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | Rp<br>297.65<br>3.500 | Rp<br>579.88<br>9.430 | Rp<br>58.226.<br>000 | Belum | Belum | 99.22% | 73.65% | 8.28% | Belum | Belum | Kesra |
| 58 | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,                                                                                                                    |  |  |  | 5<br>Laporan | 2<br>Laporan | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | Rp<br>116.81<br>7.500 | Rp<br>73.552.<br>000  | 0                    | Belum | Belum | 98.58% | 98.78% | 0     | Belum | Belum | Kesra |

|    |                                                                                                                                                           |  |  |  |                |                |                |                |                |                         |                              |                         |       |       |        |        |        |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|    | Kearsipan,<br>Trantibum Linmas                                                                                                                            |  |  |  |                |                |                |                |                |                         |                              |                         |       |       |        |        |        |       |       |       |
| 59 | Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat                    |  |  |  | 0<br>Keluarga  | 0<br>Keluarga  | 50<br>Keluarga | 50<br>Keluarga | 50<br>Keluarga | 0                       | 0                            | 0                       | Belum | Belum | 0      | 0      | 0      | Belum | Belum | Kesra |
| 60 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah |  |  |  | 0<br>Keluarga  | 0<br>Keluarga  | 50<br>Keluarga | 50<br>Keluarga | 50<br>Keluarga | 0                       | 0                            | Rp<br>18.625.<br>500    | Belum | Belum | 0      | 0      | 18.63% | Belum | Belum | Kesra |
|    |                                                                                                                                                           |  |  |  |                |                |                |                |                |                         |                              |                         |       |       |        |        |        |       |       |       |
| 51 | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                   |  |  |  | 643<br>Laporan | 793<br>Laporan | 1<br>Dokumen   | 1<br>Dokumen   | 1<br>Dokumen   | Rp<br>424.94<br>0.347   | Rp<br>200.90<br>2.681        | Rp<br>87.035.<br>544    | Belum | Belum | 98.31% | 99.23% | 28.72% | Belum | Belum | Hukum |
| 62 | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                    |  |  |  | 14<br>Laporan  | 24<br>Laporan  | 24 Kasus       | 24 Kasus       | 24 Kasus       | Rp<br>4.335.3<br>70.558 | Rp<br>19.919.<br>401.44<br>4 | Rp<br>4.338.7<br>73.850 | Belum | Belum | 99.33% | 82.45% | 42.95% | Belum | Belum | Hukum |

|    |                                                                                                            |  |  |  |                      |                      |           |            |            |                   |                  |                 |       |       |        |        |        |       |       |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 63 | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                     |  |  |  | 13 Laporan           | 793 Laporan          | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Rp 140.13 3.000   | Rp 121.58 9.200  | Rp 21.574. 000  | Belum | Belum | 98.23% | 95.43% | 14.10% | Belum | Belum | Hukum        |
| 64 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                     |  |  |  | 2 MoU, SPKS          | 18 MoU, SPKS         | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Rp 2.760.0 22.384 | Rp 165.79 1.000  | Rp 190.00 0.000 | Belum | Belum | 95.49% | 96.95% | 21.04% | Belum | Belum | Kerjasama    |
| 65 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri                                                      |  |  |  | 0 MoU, SPKS dan NPHD | 2 MoU, SPKS dan NPHD | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 0                 | Rp 366.89 2.500  | 0               | Belum | Belum | 0      | 86.53% | 0      | Belum | Belum | Kerjasama    |
| 66 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       |  |  |  | 0 Laporan            | 17 Laporan           | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 0                 | Rp 18.205 950    | 0               | Belum | Belum | 0      | 87.04% | 0      | Belum | Belum | Kerjasama    |
| 67 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |  |  |  | 3 Laporan            | 6 Laporan            | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | Rp 254.14 0.632   | Rp 337.97 1.729  | Rp 71.361. 052  | Belum | Belum | 95.01  | 97.60% | 23.32% | Belum | Belum | Perekonomian |
| 68 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |  |  |  | 10 Laporan           | 4 Laporan            |           | 100 Persen | 100 Persen | Rp 571.37 3.566   | Rp 778.94 7.490  | Rp 53.114. 300  | Belum | Belum | 95.62% | 75.74% | 8.81%  | Belum | Belum | Perekonomian |
| 69 | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |  |  |  | 2 Laporan            | 2 Laporan            |           |            |            | Rp 129.91 4.875   | Rp 143.88 91.200 | Rp 13.783. 500  | Belum | Belum | 98.76% | 97.82% | 7.74%  | Belum | Belum | Perekonomian |

|    |                                                                                       |  |  |  |            |            |  |            |            |                |                |                |       |       |        |        |        |       |       |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 70 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD |  |  |  | 0 Laporan  | 2 Laporan  |  | 68 Nilai   | 71 Nilai   | Rp 0           | Rp 17.094.000  | Rp 33.992.500  | Belum | Belum | 0%     | 55.14% | 22.22% | Belum | Belum | Perekonomian |
| 71 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan                         |  |  |  | 1 Laporan  | 1 Laporan  |  | 68 Nilai   | 71 Nilai   | Rp 179.926.015 | Rp 279.602.342 | Rp 84.050.981  | Belum | Belum | 83.35% | 96.23% | 24.01% | Belum | Belum | Pembangunan  |
| 72 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                    |  |  |  | 1 Laporan  | 1 Laporan  |  | 100 Persen | 100 Persen | Rp 232.042.377 | Rp 143.514.392 | Rp 15.657.382  | Belum | Belum | 91.03% | 70.09% | 4.17%  | Belum | Belum | Pembangunan  |
| 73 | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan       |  |  |  | 10 Laporan | 12 Laporan |  | 68 Nilai   | 71 Nilai   | Rp 233.989.725 | Rp 355.858.668 | ????           | Belum | Belum | 71.19% | 88.84% | 0      | Belum | Belum | Pembangunan  |
| 74 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            |  |  |  | 5 Laporan  | 12 Laporan |  | 68 Nilai   | 71 Nilai   | Rp 608.810.100 | Rp 414.380.794 | Rp 18.500.000  | Belum | Belum | 97.66% | 94.95% | 1.68%  | Belum | Belum | PBJ          |
| 75 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik                  |  |  |  | 4 Laporan  | 8 Laporan  |  | 100 Persen | 100 Persen | Rp 270.498.000 | Rp 8.248.600   | Rp 14.518.634  | Belum | Belum | 99.07% | 24.44% | 2.41%  | Belum | Belum | PBJ          |
| 76 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ                                |  |  |  | 3 Laporan  | 8 Laporan  |  | 68 Nilai   | 71 Nilai   | Rp 195.568.400 | Rp 61.653.600  | Rp 153.942.817 | Belum | Belum | 93.07% | 99.36% | 13.96% | Belum | Belum | PBJ          |

|    |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |             |           |  |            |            |                |              |   |       |       |        |        |   |       |       |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------|--|------------|------------|----------------|--------------|---|-------|-------|--------|--------|---|-------|-------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |             |           |  |            |            |                |              |   |       |       |        |        |   |       |       |     |
| 77 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja |  |  |  | 2 Laporan   | 4 Laporan |  | 68 Nilai   | 71 Nilai   | Rp 103.542.900 | Rp 4.666.000 | 0 | Belum | Belum | 87.00% | 16.84% | 0 | Belum | Belum | SDA |
| 78 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian                           |  |  |  | 0 Laporan   | 4 Laporan |  | 100 Persen | 100 Persen | 0              | Rp 9.518.000 | 0 | Belum | Belum | 0%     | 50.09% | 0 | Belum | Belum | SDA |
| 79 | Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan                               |  |  |  | 133 Laporan | 4 Laporan |  | 68 Nilai   | 71 Nilai   | Rp 81.359.750  | Rp 8.042.000 | 0 | Belum | Belum | 83.70  | 41.33% | 0 | Belum | Belum | SDA |
|    |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |             |           |  |            |            |                |              |   |       |       |        |        |   |       |       |     |

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

### 2.4.1. Analisa Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dengan pencermatan/identifikasi (*scanning*) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Analisis Kekuatan (*strength*) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Visi dan misi yang jelas;
  - b. Adanya dukungan dana yang cukup;
  - c. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan;
  - d. Komitmen atasan yang tinggi;
  - e. Landasan hukum yang mengatur kewenangan;
  - f. Adanya Tupoksi yang jelas;
  - g. Sarana dan Prasarana yang memadai;
  - h. Komitmen Pimpinan terhadap bawahan;
2. Analisis kelemahan (*Weakness*) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang mendukung pelayanan;
  - b. Belum terbangunnya budaya kerja yang dapat merubah mindset SDM menjadi produktif;
  - c. Belum optimalnya Koordinasi dan sinergi antar unit bagian dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
  - d. Penempatan pejabat struktural yang belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan;
  - e. Sering terlambatnya penyediaan dana yang berakibat pada tidak tepatnya pelaksanaan kegiatan;
  - f. Belum terbangunnya E-Government yang memanfaatkan Teknologidan Informasi;
  - g. Kurangnya inisiatif bawahan

### 2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Peluang (*opportunities*) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Adanya anggaran yang cukup memberikan pencapaian kinerja pelayanan yang tepat dan cepat;
  - b. Berkembangan sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif profil Kota dan potensi disegala bidang;
  - c. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan cukup baik;
  - d. Posisi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang strategis;
  - e. Dukungan Instansi Vertikal;
  - f. Adanya dukungan Pemkot dan DPRD.
2. Analisis ancaman (*threat*) Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
  - a. Persaingan kerja yang semakin kompetitif berkaitan dengan globalisasi;
  - b. Kurangnya pemahaman unsur terkait (Dinas, Badan, Bagian di bawah Pemkot) mengenai aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan;
  - c. Kurangnya koorsinasi antar Dinas, Badan dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kota;
  - d. Tingkat urbanisasi dan pengangguran yang cukup tinggi;
  - e. Penurunan disiplin;
  - f. Terjebak pada rutinitas pekerjaan;
  - g. Pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
  - a. Mendukung kebijakan Walikota berdasarkan Perda Kota Samarinda
  - b. Mengembangkan potensi dan kemampuan staf dalam peningkatan SDM;
  - c. Memanfaatkan komitmen atasan dan instansi vertikal dalam meningkatkan dan penataan tugas fungsi masing-masing;
  - d. Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal;

- e. Melaksanakan pengawasan secara internal (SPIP).
- 2. Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)
  - a. Meningkatkan program-program pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Meningkatkan inovasi program-program kerja yang terarah dan terukur;
  - c. Sosialisasi mengenai aturan, kebijakan, prosedur yang harus dilaksanakan;
  - d. Meningkatkan transparansi dan koordinasi dalam pengembangan dan penataan kelembagaan, pelayanan publik serta pengembangan ketatalaksanaan untuk mendukung reformasi birokrasi;
  - e. Menanamkan manajemen perubahan dalam merubah mindset SDM.
- 3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)
  - a. Penambahan sumber daya/tenaga staf yang sesuai kebutuhan organisasi;
  - b. Perbaikan tata ruang tempat/ruangan kerja dan peningkatan sarana dan prasarana kerja;
  - c. Program pengembangan SDM;
  - d. Penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya;
  - e. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - f. Penerbitan Strandar Operasional Prosedur.
- 4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
  - a. Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada dalam upaya meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas dan fungsi masing-masing.